

BAB III

KETERLIBATAN MASYUMI DALAM PERPOLITIKAN DI PANDEGLANG

A. Situasi dan Kondisi Sosial Politik, Ekonomi dan Keagamaan

Sebelum kemerdekaan Indonesia, kondisi di Kabupaten Pandeglang sangatlah memprihatinkan. Penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda saat itu, menyisakan duka. Adapun dampak dari penjajahan itu ialah menurunnya stabilitas sosial politik, ekonomi dan keagamaan di Pandeglang.

Setelah di proklamirkannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kabupaten Pandeglang memulai membangun struktur pembangunan di berbagai wilayah. Meskipun, sebagian masyarakat wilayah terpencil di Pandeglang belum seutuhnya merasakan adanya kebebasan.

Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di barat, serta Samudera Indonesia di Barat dan Selatan.¹ Pusat pemerintahan di Kecamatan Pandeglang, yang berada di wilayah Kabupaten. Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang terletak di dua kota yakni

¹ Dadi Ruswandi,dkk, *Dokumentasi Benda Cagar Budaya dan Kepurbakalaan Provinsi Banten Tahun 2011*, Jilid 3,(Serang : Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten, 2011),p. 2.

kota Pandeglang dan Labuan. Pasca kemerdekaan tahun 1945, kondisi Kabupaten Pandeglang memulai peningkatan diberbagai aspek pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang, sektor pertanian merupakan sektor dominan. Demikian juga sebagian masyarakatnya yang bekerja di sektor pertanian. Kebijakan pemerintah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi terus diupayakan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat.²

Daerah Pandeglang tidak hanya dikenal daerah yang memiliki potensi strategis secara geografis, namun juga dari segi sosial politik. Pandeglang telah mengalami suatu perkembangan secara vertikal. Proses Islamisasi yang berlangsung bersama proses transformasi di Asia Tenggara hingga tiba di Banten pada abad 17 hingga 19. Banten adalah salah satu dari beberapa kerajaan Islam pertama yang mendominasi kekuasaan politik Islam.³

Faktor kekuasaan Islam lebih dominan, karena adanya hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan leluhur dan perkawinan. Seperti halnya di Pandeglang, yang penduduknya terkait pelestarian kultural tradisional secara turun temurun.

² Dadi Ruswandi,dkk, *Dokumentasi Benda Cagar Budaya*p. 3.

³ Marihando, *Banten Sumber Potensi Heroisme di Nusantara*, DKPPB November 2014.p.1-4.

Seiring perkembangan waktu, pemuda-pemuda diberbagai wilayah di Banten mengalami revolusi isik yang besar, yaitu turut menegakkan kemerdekaan Indonesia dalam kondisi sedang melawan penjajah dengan cara membentuk badan-badan kelaskaran dan organisasi. Awalnya pemuda diberbagai di Banten membentuk organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan Angkatan Pemuda Indonesia (API), yang ditugaskan untuk menyebar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke wilayah-wilayah Banten.⁴

Pada masa Islamisasi cenderung hanya bersifat perkenalan saja terutama dengan sistem kepercayaan. Pengetahuan agama Islam secara luas belum mendapat perhatian, walaupun sudah dilakukan pengislaman diberbagai daerah. Posisi ulama mempunyai peranan penting dalam membangun kehidupan beragama di Pandeglang. Hubungan ulama dengan masyarakat menjadi sangat erat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, *pertama*, telah tertanam keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat, bahwa praktik-praktik ibadah yang dibawa dan dikembangkan oleh para ulama berasal dari hasil nalar mereka melalui *kitab-kitab kuning* sebagai referensi.⁵ Kitab-kitab kuning tersebut dikarang oleh para ulama klasik dengan

⁴ Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka LP2ES. 2006),p.166-167.

⁵ Ahmad Sugiri, *Dinamika Politik Kiai di Banten Pada Era Orde Baru*,(Ringkasan Disertasi Pasca Sarjana, UIN, Jakarta:2013),p.19.

mendasarkan kepada pendapat-pendapat *tabi'it tai'in* sampai dengan sahabat dan nabi. Dengan demikian, praktik-praktik ibadah yang diajarkan oleh para ulama tersebut ditinjau dan dipandang absah, setidaknya bagi kalangan *sunni*. *Kedua*, para ulama memiliki konsisten (*istiqomah*) dalam mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang pernah dipraktikan oleh para ulama terdahulu. *Ketiga*, para ulama selalu mempraktikan konsep-konsep Islam dalam kehidupan sosial politiknya.⁶ Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kehidupan islami berkembang dalam masyarakat Pandeglang.

Peranan Ulama dalam kedudukan sebagai elit sosial-keagamaan masyarakat Pandeglang adalah sebagai tokoh masyarakat (kokolotan), guru ngaji, guru tareqat, guru ilmu “hikmah” (ilmu ghaib) dan sebagai mubaligh. Adapun para ulama atau sering disebut kiai, menjadi sosok atau panutan bagi masyarakat di berbagai wilayah di Pandeglang. Sosok Ulama tersebut seperti Abuya Dimyati, Abuya Mukri, KH. Abdurrahman, KH. Uwes Abu Bakar, KH. Ahmad Chotib dan sebagainya. Adapun dari mereka merupakan bagian dari anggota sebuah organisasi Islam.

⁶ Ahmad Sugiri, *Dinamika Politik Kiai di Banten Pada Era Orde Baru.....*,p.20.

B. Keberadaan dan Perkembangan Masyumi

Banten menjadi salah satu fenomena sejarah yang menarik sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Daerah Banten tidak hanya dikenal daerah yang memiliki potensi strategi secara geografis, namun juga dari segi sosial politik. Banten adalah salah satu dari beberapa kerajaan Islam pertama yang mendominasi kekuasaan politik Islam.⁷

Faktor kekuatan Islam lebih dominan dengan adanya hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan leluhur dan perkawinan politik dengan kekuasaan pada tahun 1869, seperti raja-raja di Banten dengan Cirebon. Ketika pergeseran kekuasaan Demak runtuh, banyak daerah kecil melepaskan diri dari politik Demak. Maka, Banten berdiri sebagai kekuatan mandiri dengan potensi politiknya.⁸ Seperti penduduk desa di Banten pada tahun 1990an,

orientasi kultural penduduknya terkait pelestarian kultural tradisional secara turun-temurun yang kuat dengan agama Islam dari kesultanan Banten.

Pada saat kedatangan Jepang ke Indonesia yang dipimpin *Maruyama Masao*, Banten yang saat itu masih termasuk wilayah Barat, dikuasai oleh Jepang. Ketika itu Jepang menetapkan peraturan yaitu membagi setiap wilayah ke dalam beberapa

⁷ Marihando, *Banten Sumber Potensi Heroisme Di Nusantara*, DKPPB November 2014,p.1-4.

⁸ Marihando, *Banten Sumber Potensi*p.4-6

departemen *Gunseikanbu*, diantaranya adalah Departemen Umum, Departemen Keuangan dan Departemen Lalu Lintas. Tidak lama kemudian dilantiklah beberapa residen di Jawa Barat, salah satunya adalah R.R.A Hilman Jayadiningrat sebagai residen Banten. Jepang melakukan kontrol yang ketat terhadap kehidupan ekonomi, sehingga lalu lintas perekonomian Banten dibatasi. Pada tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan sekutu. Hal ini menyebabkan melemahnya pengaruh kekuasaan Jepang di Indonesia termasuk di Banten.⁹

Setelah Jepang menyerah dari Indonesia, di Banten daerahnya telah membentuk pasukan batalyon Pembela tanah air (PETA). Di Labuan dipimpin oleh KH. Ahmad Chatib, batalyon II di Malingping di bawah pimpinan Entol Ternaja, batalyon III di Cilegon KH. Syam'un dan batalyon IV di Pandeglang dipimpin oleh Uding Soeriatmaja. Hal ini dimanfaatkan untuk belajar berperang untuk melawan penjajah dan perlawanan yang terjadi di Caringin Labuan pada tahun 1944 dan beberapa gerakan masyarakat di Banten.¹⁰ Ketika Indonesia menyiapkan kemerdekaan, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuknya peraturan setiap provinsi terdiri atas keresidenan dan tiap keresidenan masing-masing dikepalai oleh seorang residen, dan dibagi atas Kabupaten atau Kotapraja yang diperintah oleh Bupati yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia. Salah satunya

⁹ Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*,...p.145-146

¹⁰ Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*,...p.159-160

keresidenan Banten dalam provinsi Jawa Barat, dengan residennya yaitu R. Ng. Tirtasoejatma.¹¹

Seiring perkembangan waktu, pemuda-pemuda Banten mengalami revolusi fisik yang besar yaitu turut menegakkan kemerdekaan Indonesia dalam kondisi sedang melawan penjajah dengan cara membentuk badan-badan kelaskaran dan organisasi. Pada saat itu, kendaraan umum di Banten adalah kuda atau delman. Awalnya pemuda Banten membentuk organisasi pemuda Indonesia (API). API tugasnya adalah untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke wilayah Banten.¹²

Pada tahun 1945, Ulama Islam di Indonesia yang merupakan ahli waris dari kaidah dan dasar hidup, melakukan perkumpulan di Yogyakarta untuk membahas tugas dan kewajiban mereka. Tugas dan kewajiban mereka adalah menegakkan cita-cita dalam bentuk perjuangan yang sesuai dengan tuntunan dan panggilan zaman, maka dari itu bersatu tekad untuk menegakkan perjuangan. Maka, pada saat kongres umat muslim yang diadakan pada tanggal 7 sampai 8 November 1945 yang dihadiri oleh perwakilan umat Islam Indonesia yang lahirlah Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Persiapan dalam pembentukan Masyumi dilakukan empat hari setelah waktu terbentuknya. Pembentukan Masyumi adalah salah satu kelanjutan (continiuteit) dari perjuangan umat Islam

¹¹ Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*,...p.166-167

¹² Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*,...p.158-160

menegakkan cita-cita yang merupakan kewajiban kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Pada mulanya para ulama dari berbagai macam organisasi Islam membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. Semua bergabung ke dalam MIAI, namun tujuannya hanya untuk forum melaksanakan diskusi dari masalah yang berlangsung dalam setiap organisasi tidak untuk lembaga politik. Pada tahun 1943, Jepang membubarkan organisasi Islam MIAI dan digantikan dengan Masyumi untuk kepentingan Jepang.¹³ Badan inipun merupakan suatu badan federasi dan tidak berpolitik. Kemudian menjelma pada bulan November tahun 1945 setelah kemerdekaan Masyumi sebagai partai politik tunggal.

Dua bulan setelah kemerdekaan, keluarlah kebijakan pemerintah yang memberi kebebasan perpolitik dan berdemokrasi, sehingga muncullah berpuluh partai politik, termasuk salah satunya Partai Masyumi. Partai Masyumi yang didirikan tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta awalnya merupakan tempat berhimpunnya organisasi keagamaan mulai dari yang berpaham tradisionalis seperti NU hingga yang berhaluan modernis seperti Muhammadiyah. Organisasi Islam lain seperti Persatuan Islam (Persis) di Bandung, dan Al Irsyad di Jakarta, Al Jamiyatul Washliyah dan AlIttihadiyah di Sumatera Utara, Persatuan Ummat Islam Indonesia di Majalengka dan

¹³ Ridefs MC, *Sejarah Indonesia Modern*,(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press,1991),p.290-308.

Sukabumi, Persatuan Islam di Priangan dan Bangil, Pusa di Aceh, Mathla'ul Anwar di Banten dan Nahdhatul Wathan di Lombok menyatakan dukungan dan bergabung dengan Masyumi.¹⁴

Partai Masyumi adalah partai politik Islam yang mayoritas digerakkan oleh ulama-ulama berlatar belakang organisasi keagamaan Muhammadiyah, Sumatera Thawalib, Diniyah School yang pada masa penjajahan Belanda bersama-sama berjuang dalam Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). Sebagai sebuah organisasi politik, Masyumi adalah partai yang secara terbuka memperjuangkan pelaksanaan nilai-nilai dan hukum Islam sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu secara tegas termuat dalam Pasal 2 Anggaran Dasar (AD) Partai Masyumi yang antara lain berbunyi terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Illahi.¹⁵ Masyumi adalah partai Islam yang hendak mewujudkan cita-cita Ummat Islam, sebagaimana kaum sosialis menghendaki Indonesia menjadi sosialis, atau golongan lainnya lagi mengharapkan susunan negara menurut cita-citanya. Nyatalah bahwa negara sebagai alat mengatur kehidupan di dunia, menjadi barang

¹⁴ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional; Kisan dan Analisis Perkembangan Partai Politik di Indonesia, 1945-1965*, (Bandung, Mizan, 2000), p.59.

¹⁵ Lihat "Anggaran Dasar Partai Politik Islam Masyumi" dalam S.U. Bajasut, *Alam Fikiran dan Djejak Perdjuaan Prawoto Mangkusaamito*, (Surabaya: Dokumenta, 1972), p. 381.

keinginan dan hendak dimiliki oleh beberapa golongan dalam masyarakat. Memang barang siapa menguasai negara dan alat perabotnya, dialah yang dapat melaksanakan citacitanya dalam kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁶

Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia), yang kemudian diubah menjadi Partai Politik Islam Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Soekirman Wirjosandjoyo, 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijah 1364. Namanya yang bermula Masyumi yang pernah didirikan masa Pendudukan Balatentara Jepang, 1943 M.

Namun, pada 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijah 1364 berubah menjadi satu-satunya partai politik Islam Indonesia. Mendapat dukungan dari sejumlah organisasi politik dan sosial pendidikan, antara lain : Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perserikatan Ulama, Persatuan Islam, Nahdhlaul Wathan. Kantor pengurus besar di kantor Masyumi Daerah Djogyakarta, Ngabean 25, Jogjakarta.

Partai Politik Islam Indonesia, Masyumi merupakan parta terbesar. Jumlah anggota pendukungnya untuk satu Kabupaten saja, bagi partai politik lainnya sama dengan anggota seluruh

¹⁶Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*.....,p.126.

Indonesia. Masyumi juga memiliki Laskar Hizbullah yang bersenjata berjumlah 20.000 hingga 25.000 pemuda.¹⁷

Adapun pimpinan partai yang merupakan *Intellectual brain trust* adalah Choedratoes Syeh Rois Akbar, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasim, Dr. Sukiman Wirjosandjoyo, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Syafruddin Prawiranegara, Yusuf Wibisono, Haji Agus Salim, dan Aruji Kartawinata. Walaupun Partai Islam Indonesia, Masyumi sebagai partai terbesar yang mempunyai pendukung Laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah, serta berperan besar dalam pembentukan : BKR (Badan Keamanan Rakyat), 22 Agustus 1945; TKR (Tentara Keamanan Rakyat), 5 Oktober 1945; TRI (Tentara Republik Indonesia), 24 Januari 1945; TNI (Tentara Nasional Indonesia), 5 Mei 1947, namun tidak pernah dalam perjalanan sejarahnya melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia.¹⁸

Di Pandeglang pada umumnya kebanyakan pengaruhnya dari Masyumi itu terjadi, karena tokoh Masyumi telah lama mengembangkan ajaran Islam di Pandeglang. Tokoh-tokoh Masyumi di Pandeglang, diantaranya KH. Abu Bakar uwes, KH. Abdurrahman dan sebagainya. Perkembangannya begitu drastis karena kaidah ke Islaman diterima oleh Masyarakat. Memberikan

¹⁷ George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1970), p.210.

¹⁸ Ahmad Mansur Suryanegara, *API Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani, 2010), cet. II, p.180-183.

sumbangsih yang besar dalam identitas keagamaan yang ditanamkan pada masyarakatnya yang telah dibimbing supaya terbiasa melaksanakan sunah-sunah Rasul dan mengaji kitab kuning. Dalam kajian ke Islaman Modern juga telah diterima dengan baik oleh masyarakat Pandeglang. Seiring dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu.¹⁹

C. Pengaruh Masyumi terhadap Masyarakat Pandeglang

Banten merupakandaerah yang pernah menjadi pusat kerajaan Islam, serta penduduknya yang terkenal sangat taat terhadap agama, seperti halnya daerah Pandeglang sudah sewajarnya, jika Kiyai menempati kedudukan yang penting dalam masyarakat. Kiyai yang merupakan gelar ulama dari kelompok Islam tradisional tidak hanya dipandang sebagai tokoh agama, tetapi juga seorang pemimpin masyarakat. Kekuasaannya sering kali melebihi kekuasaan pemimpin formal, terutama di pedesaan. Bahkan pengangkatan pemimpin formal di suatu desa ditentukan oleh pemuka-pemuka agama di daerah yang bersangkutan.²⁰

Pengaruh Kiyai yang melewati batas-batas geografis pedesaan berkat legitamisi masyarakat untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, adat dan menginterpretasi doktrin-doktrin

¹⁹ Wahab Afif dkk, *Prof. K.M. H. Sjadzli Hasan Ulama Pejuang Negarawan*, (Bandung: Publishing Baiturrahman,2004),p.54-57

²⁰ Abdul Malik, dkk, *Jejak Ulama Banten.....*, p.xii.

agama. Selain itu, seorang Kiyai dipandang memiliki kekuatan-kekuatan spiritual, karena kedekatannya dengan Sang Pencipta. Kiyai dikenal tidak hanya sebagai guru di pesantren, melainkan juga sebagai guru dan pemimpin kharismatik masyarakat. Penampilan Kiyai yang khas, seperti bertutur kata lembut, berperilaku sopan, berpakaian rapih dan sederhana , serta membawa tasbih untuk berdzikir kepada Allah SWT, merupakan simpol-simbol kesalehan. Karena itu, perilaku dan ucapan seorang Kiyai menjadi panduan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kedudukan dan perannya yang sangat strategis tersebut menjadikan seorang Kiyai tidak hanya tinggal diam di pesantren yang ia pimpin, akan tetapi juga hidup di tengah-tengah masyarakat luas. Ia memiliki jaringan komunitas yang sangat luas dengan berbagai lapisan masyarakat. Jaringan itu terbentuk melalui organisasi-organisasi keagamaan dan masyarakat, partai politik, guru-murid, ajaran-ajaran tarekat dan sebagainya.²¹

Ada beberapa alasan keterlibatan kiyai atau ulama dalam dunia politik. *Pertama*, ajaran Islam yang bersumber kepada al-qur'an dan al-hadits, yang banyak mengandung ajaran tentang hidup bersama, termasuk tentang tatacara pemecahan berbagai masalah dengan menggunakan musyawarah dan tentang negara, yang kesemuanya merupakan bagian dari kajian obyek politik. Dari ajaran Islam tentang politik ini, pada perspektif historis

²¹ M.A. Tihami, *Kiyai dan Jawara di Banten*,1992,Tesis Master Universitas Indonesia, tidak diterbitkan,p.99-100.

kemudian merefleksikan diri pada struktur religio-politik, mempunyai implikasi-implikasi sosio-politik, yang kemudian erat kaitannya dengan pembentukan struktur keulamaan dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Struktur kekiyaian inilah yang kemudian berperan besar dalam membentuk dan mempengaruhi kekuasaan politik formal istana. Dalam pengertian lain, para Sultan harus tetap mempertimbangkan nilai Islam dalam membuat atau melakukan tindakan-tindakan politiknya. Ini berarti, bahwa istana senantiasa akan terus menerus berupaya memperoleh legitimasi Islam atas kekuasaannya, tanpa itu maka otoritasnya tidak memperoleh legitimasi rakyat. Dengan demikian, struktur keulamaan secara tidak langsung telah menjadi kutub-kutub kekuasaan yang berada di luar istana yang independen.

Kedua, posisi ulama memiliki pengikut dan pengaruh yang tidak jarang melampaui batas-batas wilayah dan etnis. Fenomena tersebut menyebabkan mereka terlibat dalam berbagai persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan kemasyarakatan. Lebih jauh dari itu, ulama dalam mengembangkan dakwah atau misinya juga membutuhkan pengaruh penguasa yang dapat dijadikan sebagai sumber legitimasi.²²

²² Ahmad Sugiri, "Kiprah Ulama Banten dalam Pentas Politik Nasional", *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol.11, No.01 (Januari-Juni, 2013),p.4-5

Pada umumnya, sebagian besar ulama di Pandeglang tinggal di pedesaan berbaur dengan masyarakat desa yang berlatarbelakang budaya agraris. Namun mereka menempati posisi sebagai elite desa. Mereka menerima penghormatan dan penghargaan yang tinggi dari masyarakat di sekitarnya. Bahkan dibandingkan dengan para petani kaya, kepala desa, dan pedagang kaya, kiyai menempati posisi yang lebih terhormat. Ini telah menjadikannya sebagai pemimpin informal yang paling otoritatif dan kharismatik dalam masyarakat.²³ Pengaruh kepemimpinannya melampaui batas-batas etnik dan geografis. Akan tetapi, meluas pada wilayah lainnya termasuk pada dunia politik. Rasa hormat terhadap kiyai diperkuat oleh budaya masyarakat Indonesia yang pada umumnya bersifat paternalistik. Ada hubungan yang tidak setara antara kiyai sebagai patron, dan para pengikutnya sebagai subordinat atau klien. Patron dilihat sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan materil dan spiritual para pengikutnya dan pada gilirannya menuntut penghormatan dari mereka.²⁴

Adapun dari perspektif sejarah Banten, keterlibatan ulama dalam politik, telah dimulai sejak masa-masa awal proses Islamisasi di wilayah ini. Di era kesultanan, mereka menikmati kedudukan yang sangat strategis dalam struktur sosial politik dan

²³ Ahmad Sugiri, "Kiprah Ulama Banten dalam Pentas Politik Nasional".....,p.6.

²⁴ Ahmad Sugiri, "Kiprah Ulama Banten dalam Pentas Politik Nasional".....,p.7-8.

ekonomi. Ketika kesultanan Banten dihapus oleh Deandles awal abad ke-19, dan wilayah bekas Kesultanan Banten dimasukkan sebagai bagian dari hegemoni Hindia Belanda. Lembaga Qad'i masih tetap dipertahankan keberadaannya, akan tetapi karena lembaga ini seringkali menimbulkan persoalan terkait dengan kepentingan-kepentingan politik pemerintah Hindia Belanda. Maka, pada tahun 1856 lembaga tersebut dihapus dan diganti dengan lembaga kepenghuluan yang lebih akomodatif dan kooperatif terhadap pemerintah.

Para ulama independen tersebut, kemudian eksodus ke pedesaan, disana mereka membaaur dengan masyarakat desa untuk mendirikan pesantren-pesantren, membina kehidupan beragama bagi masyarakat yang memang sejak di hapusnya kesultanan Banten , mereka haus akan bimbingan kehidupan beragama. Meskipun demikian, nampaknya mereka masih tetap melaksanakan fungsi-fungsi politiknya, yaitu melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dirasakan kurang sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama.²⁵

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah bagian dari Banten yang mayoritas kedudukan pemerintahan yang mayoritas dipegang oleh sebagian para ulama. Meskipun Kabupaten Pandeglang sampai kini masih termasuk Kabupaten

²⁵ Ahmad Sugiri, "Kiprah Ulama Banten dalam Pentas Politik Nasional"p.10.

yang tertinggal, tetapi realitas politik di daerah ini tidak kalah serunya dengan daerah-daerah lain. Ketertinggalan dan kemiskinan sering menjadi tema yang layak dijual dalam setiap kampanye partai politik, selain isu-isu agama dan budaya.²⁶

Sebagai daerah yang penduduk dikenal taat beragama, peran tokoh-tokoh agama sangat penting dalam realitas politik di Pandeglang. Kiyai masih dijadikan sebagai referensi pilihan politik bagi sebagian warganya. Hampir tidak ada partai politik yang tidak memanfaatkan potensi tersebut.

Pada masa awal Kemerdekaan Indonesia, para ulama di Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang, masih memperlihatkan peranannya yang signifikan dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan, hampir seluruh jabatan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, sejak dari Residen sampai dengan Lurah dijabat oleh para ulama dan kiyai yang memiliki otoritas dan kharisma kepemimpinan di wilayahnya masing-masing. Begitu pula di era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Para ulama dan kiyai masih memperlihatkan peranannya sebagai sosial kontrol dan terlibat dalam percaturan politik baik lokal maupun nasional. Adapun peran tersebut melalui wadah partai-partai politik yang berasaskan Islam, seperti Masyumi, PSII dan lainnya. Pada pemilu tahun 1955, mayoritas penduduk Pandeglang mendukung Masyumi yang diidentifikasi sebagai

²⁶ Muhamad Hudaeri, *Relasi Kuasa Agama dan Politik dalam Pilkada Pandeglang*, (Serang: FUD Press, 2009), p.42.

partai Islam.²⁷ Salah satu tempat musyawarah Masyumi ialah berada di Menes. Anggota-anggota saat itu yang menjadi bagian dari Masyumi ialah dari berbagai ormas NU, Mathla'ul Anwar dan sebagainya. Salah satu anggota Masyumi yang juga bagian dari anggota Mathla'ul anwar ialah KH. Abu bakar Uwes. Beliau saat itu menjabat sebagai sekretaris pada tahun 1950an.²⁸

Partai Masyumi telah melibatkan diri sebagai peranan penting dalam kancah politik demokrasi parlementer pada tahun 1950. Pada tahun 1957, Masyumi menginginkan sebuah Negara Islam, dan ingin membentuk pemerintahan yang berpandangan pragmatis, serta ingin berkoalisi dengan partai-partai sekuler.

Pada awal demokrasi parlementer, Masyumi mengalami ketimpangan dalam pembagian kekuasaan pemerintahan yang terkesan kurang adil. Sehingga, Masyumi tidak terlalu banyak andil dalam kabinet. Akan tetapi, Masyumi lebih menekankan perlunya persatuan serta pertahanan kemerdekaan dari pada mempersoalkan kepentingan partainya sendiri. Oleh karena itu, Masyumi tidak setuju dengan adanya perubahan sistem kabinet presidensil ke kabinet parlementer.

Pemilu 1955 adalah Pemilihan Umum yang pertama kali dilaksanakan semenjak Indonesia merdeka. Pada awalnya, pemilu

²⁷ Muhamad Hudaeri, *Relasi Kuasa Agama dan Politik dalam Pilkada Pandeglang.....*,p.43.

²⁸ Wawancara dengan H. Ma'mun, Menes, Kadu Bangkong, 16 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

direncanakan pada tahun 1946, enam bulan setelah kemerdekaan. Namun situasi yang tidak memungkinkan karena adanya perang kemerdekaan akibat agresi Belanda I dan II. Jadi, pelaksanaan pemilu tertunda. Pada saat memasuki demokrasi parlementer, setiap kabinet dalam programnya mencantumkan pelaksanaan pemilu. Namun, hal ini tidak terjadi karena perebutan kekuasaan yang mengakibatkan kabinet jatuh-bangun, sehingga menimbulkan dampak tidak terlaksanakannya program pelaksanaan pemilu.